

STRATEGI INKLUSIF DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER UNTUK MEMPERSIAPKAN GENERASI BERKEADILAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Taufiqoh Khasanah¹, Nur Khasanah¹

ABSTRACT

Gender equality is a central issue in building a just society, particularly in education where discrimination and gaps persist. This research aims to develop inclusive strategies for gender equality in education to prepare a fair generation. Using a qualitative descriptive approach through literature study, this study analyzes the concepts, challenges, and practical solutions for implementing gender-responsive education. The findings highlight the importance of overcoming structural and cultural barriers, empowering teachers and students, and adopting supportive school policies. Inclusive gender education contributes to the development of balanced human resources and fosters social justice. The research concludes that commitment from all educational stakeholders is essential for realizing sustainable gender equality.

Keywords: gender equality, inclusive education, social justice

ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan isu sentral dalam membangun masyarakat yang adil, terutama di bidang pendidikan yang masih menemukan tantangan diskriminasi dan kesenjangan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan strategi inklusif kesetaraan gender dalam pendidikan untuk mempersiapkan generasi berkeadilan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis konsep, tantangan, dan solusi praktis dalam pelaksanaan pendidikan responsif gender. Hasilnya menegaskan pentingnya mengatasi hambatan struktural dan kultural, pemberdayaan guru dan siswa, serta adopsi kebijakan sekolah yang mendukung. Pendidikan inklusif gender berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang seimbang dan mendorong keadilan sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan sangat diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kesetaraan gender, pendidikan inklusif, keadilan sosial

¹ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

(taufiqoh.khasanah24070@mhs.uingusdur.ac.id)

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28 I UUD Negara RI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki kebebasan untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun serta berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi tersebut (Larashati, 2022). Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Meski demikian, kenyataannya ketidaksetaraan gender masih ditemukan di berbagai bidang kehidupan (Collins et al., 2021). Urgensi ini muncul seiring dengan dimasukkannya isu gender sebagai salah satu tujuan utama dalam transformasi kolektif global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, yang menunjukkan bukti nyata meningkatnya perhatian dunia terhadap masalah kesetaraan dan keadilan gender (Kusumawardhana & Pertamina, 2015).

Kesenjangan gender masih menjadi permasalahan signifikan di Indonesia. Ketidaksetaraan ini tidak hanya disebabkan oleh tradisi dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya menanamkan pemahaman bahwa posisi perempuan dianggap lebih rendah (Judiasih, 2022). Di berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, tantangan terkait kesenjangan dan diskriminasi berbasis gender masih sering ditemukan. Pendidikan bukan sekedar media untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis dalam membangun karakter, cara berpikir, dan sikap generasi muda. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai

kesetaraan gender dalam sistem pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong perubahan sosial yang positif.

Kondisi ketidaksetaraan gender yang ada saat ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural yang membatasi kesempatan bagi sebagian kelompok, terutama perempuan dan kelompok minoritas gender, dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya pendidikan secara optimal. Hal ini dapat berdampak pada reproduksi ketidakadilan sosial dan menahan potensi penuh yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian, pengembangan strategi pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan belajar yang setara, serta lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan mereka.

Strategi inklusif dalam kesetaraan gender tidak hanya berfokus pada penghapusan diskriminasi, tetapi juga untuk membentuk pemahaman kritis terhadap stereotip dan norma-norma gender yang selama ini mengakar kuat dalam masyarakat. Pendidikan yang berperspektif gender diharapkan mampu mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya sadar akan pentingnya kesetaraan, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan yang proaktif untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan penuh keharmonisan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kajian dan pengembangan strategi-strategi inklusif dalam pendidikan yang dapat mempersiapkan generasi berkeadilan, guna mencapai tujuan pembangunan manusia yang seimbang dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Studi literatur merupakan teknik penyelesaian Masalah yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis sebelumnya, seperti jurnal dan artikel. Metode ini juga dikenal dengan istilah studi kepustakaan (Library Research). Sebelum melaksanakan penelitian, seorang peneliti wajib memiliki pemahaman yang luas dan mendalam mengenai objek atau topik yang akan diteliti dan dibahas. Pada kesempatan ini, penulis akan membahas mengenai Strategi Inklusif Kesetaraan Gender Untuk Mempersiapkan Generasi Berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kesetaraan Gender dan Konsep Strategi Inklusif

Sex lebih menekankan pada aspek biologis seperti kondisi fisik manusia, sistem reproduksi, hormon, dan ciri-ciri biologis lainnya. Secara bahasa, gender berarti perbedaan jenis kelamin yang terlihat antara laki-laki dan perempuan, terutama berdasarkan nilai sosial dan pola perilaku. Gender mencakup peran, tanggung jawab, hak, dan perilaku yang dibentuk oleh budaya dan lingkungan sosial tempat seseorang dibesarkan (Mantu et al., 2022).

Gender adalah konstruksi sosial yang tidak melekat secara alami sejak lahir sehingga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan berbagai konteks seperti waktu, tempat, budaya, agama, negara, status sosial, ideologi, hukum, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, gender bukanlah ketentuan dari Tuhan, melainkan konsep manusia yang relatif dan

bisa berubah pada laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, jenis kelamin adalah ketentuan Tuhan yang tetap, universal, dan tidak dapat diubah atau diperdebatkan (Suharuddin, 2020). Istilah gender kerap disalahartikan sebagai jenis kelamin, namun maknanya telah mengalami perubahan sejak tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Awalnya, gender diartikan sebagai peran sosial yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, tetapi sejak tahun 2011 istilah ini meluas maknanya untuk mencakup identitas dan ekspresi pribadi seseorang, serta cara individu berinteraksi dengan lembaga sosial berdasarkan bagaimana mereka menampilkan gendernya (Yanti et al., 2025).

Pemahaman tentang perbedaan antara jenis kelamin dan gender sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi dalam upaya mencapai kesetaraan. Karena gender merupakan konstruksi sosial yang bersifat dinamis, perubahan dalam sikap dan norma masyarakat memungkinkan terciptanya lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua orang tanpa pengecualian. Kesetaraan gender berarti pria dan wanita sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka dan membuat pilihan dalam hidup tanpa adanya batasan yang berasal dari pandangan atau peran tradisional yang membedakan berdasarkan jenis kelamin (Qomariah, 2019). Dengan demikian, keduanya dapat ikut aktif dalam berbagai sektor seperti, ekonomi, hukum, politik, sosial, pertahanan, budaya, keamanan, pendidikan serta memiliki hak yang

sama untuk menikmati hasil pembangunan (Fibrianto, 2018).

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat terjebak dalam pola pikir yang terbatas mengenai apa yang sebenarnya harus mereka pahami. Isu kesetaraan gender di Indonesia masih sering menjadi bahan perdebatan dan perhatian. Istilah kesetaraan gender muncul karena adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Hak-hak tersebut harus berbagai berkualitas, peluang berkarir, kebebasan beragama, serta kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan peran dalam dunia politik (Manalu et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam memahami gender diperlukan agar kebijakan dan praktik di berbagai bidang, terutama pendidikan, dapat mendorong penerimaan, penghormatan, dan pemberdayaan terhadap keberagaman identitas dan peran gender.

Di Indonesia, sejak masa R.A. Kartini, perjuangan keadilan dan kesetaraan gender mulai muncul, dengan emansipasi sebagai titik awal kebebasan perempuan Indonesia untuk memperoleh pendidikan setara dengan laki-laki. Kartini menyatakan bahwa dorongan perubahan tidak hanya berasal dari pengaruh luar seperti ide-ide dari Eropa yang masuk ke hatinya. Bahkan ketika kata "emansipasi" belum dikenal dan maknanya belum ada dalam pikirannya, sudah ada keinginan kuat dalam dirinya sejak kecil untuk meraih kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian. Kondisi di sekitarnya yang menyakitkan dan

membuatnya sedih justru membangkitkan hasrat tersebut semakin ku (Sulistiyowati Yuni, 2020).

Perjuangan yang dimulai oleh R.A. Kartini ini menjadi landasan penting bagi upaya terus-menerus dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang, khususnya dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan berfungsi sebagai media utama untuk membentuk cara berpikir, sikap, serta perilaku individu sejak usia dini. Melalui penerapan prinsip kesetaraan gender, seluruh individu, baik pria maupun wanita, mendapatkan peluang yang setara untuk mengakses pendidikan bermutu tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Hal ini tidak hanya membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya, tetapi juga memungkinkan laki-laki memahami peran gender secara lebih luas dan inklusif sesuai dengan perkembangan zaman.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kesetaraan gender termasuk faktor penting yang memengaruhi ketimpangan dalam pendidikan. Sebagai contoh, penelitian Thomas et al. (2001) menjelaskan bahwa kesenjangan gender yang diukur dari perbedaan tingkat melek huruf antara perempuan dan laki-laki, memiliki hubungan positif dengan koefisien gini pendidikan. Hubungan ini semakin menguat seiring waktu sehingga dapat disimpulkan bahwa pengurangan kesenjangan gender dalam bidang

pendidikan dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendidikan (Yuniar & Yuniasih, 2022).

Pendidikan yang berperspektif gender dapat membantu mengurangi stereotip dan norma sosial yang membatasi peran serta kontribusi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dengan pendidikan yang setara, perempuan tidak lagi dipandang hanya dalam peran domestik, melainkan juga sebagai agen perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sebaliknya, laki-laki juga diajarkan untuk menghargai dan mendukung kesetaraan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan setara antara keduanya. Pendidikan menjadi media strategis untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial yang inklusif sejak tahap awal perkembangan individu.

Lebih jauh, penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan memberikan dampak langsung yang sangat penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Ketika akses dan mutu pendidikan diberikan secara adil, potensi seluruh individu dapat dikembangkan maksimal tanpa adanya ketimpangan gender. Hal ini akan memperkuat daya saing bangsa di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan harus terus dilakukan melalui kebijakan yang berpihak, kurikulum yang responsif gender, serta lingkungan belajar yang bebas kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, penegakan kesetaraan gender di dunia pendidikan bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan investasi strategis untuk masa depan bangsa yang lebih berkeadilan dan bermartabat. Pendidikan yang inklusif dan setara gender akan menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi juga memiliki rasa keadilan sosial yang kuat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang berimbang dan harmonis. Untuk mencapai kesetaraan gender secara nyata, lembaga pendidikan perlu mengadopsi berbagai strategi inklusif yang melibatkan seluruh komponen sekolah antara lain:

1) Penguatan Kurikulum yang Responsif Gender

Kurikulum pendidikan hendaknya memperhatikan prinsip kesetaraan (*equality*), bukan hanya sekadar melakukan perubahan posisi atau struktur. Pendekatan responsif gender dalam pendidikan bertujuan memastikan kesetaraan dengan memberikan perhatian yang adil terhadap kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki serta mengatasi hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Pertama, kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya sekadar memberikan akses yang sama, tetapi juga mencakup perlakuan yang setara dan adil dalam proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Pendekatan responsif gender juga mengakui perbedaan antara individu dan menjamin bahwa pendidikan menghargai kebutuhan serta

potensi setiap peserta didik tanpa memandang jenis kelamin.

Kedua, dalam proses pembelajaran, pengalaman laki-laki dan perempuan bisa berbeda sehingga memengaruhi tingkat partisipasi dan pencapaian belajar mereka. Oleh sebab itu, guru perlu menciptakan suasana kelas yang peka terhadap perbedaan dan kebutuhan berdasarkan gender. Ketiga, dalam pelaksanaan responsif gender, materi pembelajaran harus mengintegrasikan perspektif gender, guru harus memperlakukan semua siswa secara adil serta memberikan perhatian yang setara terhadap kebutuhan khusus masing-masing, dan lingkungan sekolah harus mampu menyediakan ruang yang aman dan inklusif untuk semua peserta didik. Keempat, penerapan pendidikan yang responsif gender dapat meningkatkan keterlibatan siswa, kesejahteraan mereka, dan hasil belajar, serta berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan pendidikan dan juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial yang lebih luas (Fadilatun Nisa As Sayuti & Syahrul Sitorus, 2025).

2) Pelatihan dan Pemberdayaan Guru

Pemberdayaan guru adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar guru siap menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Ini termasuk memberikan kewenangan, tanggung jawab,

dan motivasi untuk berinovasi, serta menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai. Guru juga perlu mengikuti pengembangan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan agar selalu update dengan kurikulum terbaru, metode pengajaran dan teknolog. Peran guru sangat penting dalam mencapai kualitas pendidikan yang optimal, baik dari sisi materi maupun pelayanan (Nani Sumarni & Soleha, 2024).

Kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan prinsip penting yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan guru. Guru sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan di lingkungan sekolah. Dengan memberdayakan guru agar lebih peka dan memahami isu gender, mereka dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan menghapuskan diskriminasi berbasis gender.

Selain itu, pemberdayaan guru terkait kesetaraan gender juga berarti memberikan pelatihan khusus tentang bagaimana mengatasi stereotip dan bias gender dalam pengajaran. Guru perlu dibekali dengan kompetensi untuk mengenali serta mengintervensi praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan gender, baik dalam materi pembelajaran maupun interaksi sosial di kelas. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi ruang yang mendukung

pemberdayaan semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan sehingga dapat mendorong peningkatan prestasi dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu mendukung pemberdayaan guru dalam perspektif kesetaraan gender dengan menyediakan kebijakan yang jelas dan sumber daya yang memadai. Dukungan ini penting agar guru mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Penerapan kesetaraan gender secara konsisten dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar tetapi juga dalam membentuk sebuah masyarakat yang adil dan harmonis.

3) Pemberdayaan Anak

Dalam kerangka tinjauan sosiologis yang menitikberatkan pada interaksi antar individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat (Lawado & Na'imah, 2019), pemberdayaan anak untuk kesetaraan gender menjadi aspek penting yang harus diperhatikan sejak dini. Lingkungan sosial, sebagai tempat utama proses sosialisasi, memegang peranan besar dalam membentuk cara berpikir anak terkait peran dan hak gender. Dengan menciptakan lingkungan sosial

yang mendukung dan menghilangkan stereotip gender, anak-anak dapat diberdayakan untuk mengembangkan gagasan, keterampilan, dan kemampuan secara setara tanpa dibatasi oleh norma tradisional yang diskriminatif.

Latar belakang pendidikan juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ini. Pendidikan yang inklusif dan sensitif terhadap isu gender membantu anak-anak mengenali dan menghargai kesetaraan, serta menyadari pentingnya berpikir kritis terhadap perbedaan peran yang kerap diberikan berdasarkan jenis kelamin. Melalui pembelajaran yang mendorong pemahaman dan penerapan kesetaraan gender, anak-anak bisa diasah untuk memahami bahwa potensi mereka sama besarnya, tanpa memandang apakah mereka laki-laki ataupun perempuan

Selain itu, kelompok-kelompok anak yang terbentuk berdasarkan aktivitas belajar, bermain, dan organisasi menjadi ruang efektif bagi pemberdayaan kesetaraan gender. Di dalam kelompok-kelompok ini, anak-anak belajar berinteraksi secara setara, berbagi tanggung jawab, serta menghormati perbedaan peran tanpa diskriminasi. Pemberdayaan melalui kelompok sosial ini memungkinkan anak-anak untuk memperkuat rasa percaya diri dan solidaritas, sekaligus membentuk sikap

yang melawan ketidakadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Kebijakan Sekolah yang Prokesetaraan Gender

Pendidikan dari sudut pandang gender menegaskan bahwa akses pendidikan harus terbuka bagi seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, atau bangsa. Namun, perhatian utama diberikan pada peningkatan mutu pendidikan baik untuk maupun laki-laki maupun perempuan guna mendukung terciptanya kesetaraan gender dalam interaksi antara keduanya (Harefa, N., Pasaribu, V. A. R., & Rajagukguk, 2024).

Dalam konteks ini, kebijakan sekolah yang mendukung prokesetaraan gender sangatlah penting sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil dan inklusif. Sekolah perlu menerapkan aturan serta program yang mempromosikan perlakuan setara bagi seluruh siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Contohnya, penghapusan stereotip gender dalam materi pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler harus dijadikan prioritas sehingga dapat memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang setara dalam mengembangkan minat dan bakat masing-masing.

Selain itu, kebijakan tersebut harus mencakup

pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar mereka sadar akan pentingnya kesetaraan gender dan mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Melalui penerapan kebijakan yang jelas dan konsisten, sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung terciptanya sikap saling menghargai dan menghormati antar siswa laki-laki dan perempuan, serta menghilangkan diskriminasi yang masih kerap terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan sekolah yang mendukung prokesetaraan gender bukan hanya berperan dalam memperbaiki kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang mampu hidup dalam masyarakat yang menghargai kesetaraan dan keadilan bagi semua. Langkah ini juga akan memperkuat fondasi sosial untuk mewujudkan perubahan yang lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan di masa depan.

5) Keterlibatan Keluarga dalam Membangun Kesetaraan Gender

Upaya membangun kesetaraan gender dalam keluarga sangat penting, antara lain melalui kerja sama yang setara antara suami, istri, dan anak. Kesetaraan ini berarti pembagian tugas dalam keluarga dilakukan secara adil, mencakup pekerjaan domestik, peran publik, hingga aktivitas sosial di

masyarakat. Pembagian peran antara suami dan istri juga meliputi pemberian ide, nasihat, perhatian, serta dukungan dalam bentuk tenaga dan waktu. Oleh karena itu, menciptakan keharmonisan keluarga sangat diperlukan, antara lain melalui kebersamaan dalam mendidik generasi muda dan sikap gotong royong dalam keluarga.

Selanjutnya, dengan terciptanya keharmonisan gender di dalam keluarga, akan terbentuk keutuhan keluarga. Kesetaraan gender juga akan menumbuhkan kerja sama yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, sosial, dan kemasyarakatan. Demi mewujudkan negara yang sejahtera, diperlukan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga serta masyarakat.

Salah satu cara membangun kesetaraan gender adalah melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), yaitu organisasi yang melibatkan peran serta laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan keluarga sejahtera. Kesejahteraan keluarga akan menimbulkan kondisi penuh harmoni, kedamaian, dan ketenteraman. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud dalam keluarga sehingga tercipta keluarga sakinhah, mawaddah, dan

rahmah. Pemahaman terhadap norma dan nilai-nilai agama juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kehidupan berkeluarga (Febri & Ponorogo, 2022).

B. Peran Pendidikan dalam Membangun Kesetaraan Gender

Pendidikan berperan sebagai media transformasi nilai, termasuk dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender (Isworo & Ahmad, 2025). Salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan, melalui pendidikan ini, siswa diajarkan tentang demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan, dan hak serta kewajiban warga negara, termasuk pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat. Kesetaraan gender di sekolah harus ditegakkan dengan menghilangkan stereotip peran berdasarkan jenis kelamin dan memberi contoh pembagian peran yang adil tanpa diskriminasi. Kurikulum pendidikan harus menekankan pada kesetaraan (*equality*), bukan hanya perubahan posisi, karena penelitian menunjukkan prestasi belajar siswa perempuan cenderung lebih positif dibandingkan laki-laki. Guru memiliki peran sebagai fasilitator dan pembimbing untuk menghindari diskriminasi gender di sekolah.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan kebijakan dan instruksi seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam pendidikan. Upaya ini bertujuan mengatasi kesenjangan dan memberi perlindungan hukum agar perempuan mendapat kesempatan

pendidikan setara dengan laki-laki. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan secara tepat dapat memperkuat kesadaran gender dan mewujudkan kesetaraan gender, terutama dalam membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dalam pendidikan dan kehidupan (Theresia Panggabean, 2024).

C. Tantangan dan Solusi Implementasi Pendidikan Kesetaraan Gender di Indonesia

Mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif dapat ditempuh melalui salah satu upaya utama, yaitu pendidikan tentang gender. Sistem pendidikan di Indonesia menekankan pentingnya pemahaman mengenai kesetaraan hak dan tanggung jawab antara pria dan wanita sehingga setiap individu dapat berperan setara di berbagai bidang kehidupan. Namun, pelaksanaan pendidikan gender masih menghadapi sejumlah kendala, baik berkaitan dengan faktor budaya, regulasi, maupun fasilitas pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan berbagai hambatan yang ada dalam pendidikan gender di Indonesia serta langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

a) Tantangan Implementasi Pendidikan Kesetaraan Gender di Indonesia

Mencapai kesetaraan gender di Indonesia adalah sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang, karena akar permasalahannya berasal dari budaya dan pemahaman tradisional yang masih kuat melekat di masyarakat. Norma

budaya yang diwariskan secara turun-temurun menciptakan pembagian peran yang tegas antara laki-laki dan perempuan, sehingga membatasi kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang secara maksimal. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya diskriminasi gender yang berakar pada persepsi bahwa laki-laki lebih unggul dibanding perempuan, yang berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan seperti perbedaan upah, status sosial, kesempatan berkarir, serta akses ke pendidikan. Perempuan sering kali diharapkan untuk mengalah dan menomorduakan ambisinya, sementara diskriminasi yang mereka hadapi meluas dari tempat kerja hingga dunia pendidikan, di mana mereka sering kali tidak mendapatkan hak dan peluang yang setara dengan laki-laki.

b) Solusi Mendukung Implementasi Pendidikan Kesetaraan Gender di Indonesia

Meski mewujudkan kesetaraan gender merupakan tantangan besar, hal tersebut bukanlah hal yang mustahil, walaupun prosesnya memerlukan waktu cukup panjang karena nilai-nilai budaya yang sudah mengakar. Pendidikan memiliki peran krusial sebagai agen perubahan, di mana masyarakat harus diberikan pemahaman tentang

pentingnya kesetaraan gender, dan pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam memastikan keadilan gender di berbagai lembaga pendidikan. Kurangnya pendidikan yang memadai dapat menimbulkan ketidaktahuan yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik hingga sosial.

Misalnya, keluarga yang masih mengadopsi sistem patriarki dan kurang pemahaman tentang kesetaraan gender cenderung memberikan prioritas kepada anak laki-laki, sementara membatasi peluang anak perempuan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong kesetaraan gender dengan menerapkan kebijakan yang memperkuat perlindungan hak perempuan, menghapuskan kekerasan berbasis gender, memperluas akses ke layanan kesehatan reproduksi, serta melaksanakan program kampanye dan pendidikan yang meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kono mengusulkan solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yaitu dengan merancang undang-undang perlindungan perempuan yang tidak memihak atau merugikan perempuan. Selain itu, legislatif perlu menyusun peraturan yang adil dan tidak diskriminatif, yang memberikan manfaat

seimbang bagi perempuan dan laki-laki. Penting juga dilakukan sosialisasi terhadap undang-undang yang sudah disusun agar masyarakat memahami isu ketidaksetaraan gender yang ada di tengah masyarakat. Lebih lanjut, penanaman prinsip gender harus dilakukan dalam setiap kebijakan publik dan diterapkan di seluruh program serta kebijakan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan (Natasha, 2013).

Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga dapat berperan dengan menyebarkan pengetahuan, khususnya mengajak laki-laki untuk menjadi pendukung aktif kesetaraan gender. Kesimpulannya, pencapaian kesetaraan gender hanya bisa tercapai dengan komitmen dan kerja sama seluruh elemen masyarakat, melalui perubahan sistemik di berbagai bidang yang menghasilkan kesetaraan yang sesungguhnya (Kadir, 2025).

4. KESIMPULAN

Kesetaraan gender merupakan pondasi krusial dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi tanpa hambatan berupa stereotip atau diskriminasi. Melalui pendekatan ini, pendidikan menjadi sarana efektif untuk membentuk kesadaran dan nilai-nilai keadilan sejak dini.

Implementasi strategi inklusif dapat dilakukan dengan menguatkan kurikulum

yang mempromosikan kesetaraan, memberdayakan guru dan siswa agar lebih peka terhadap isu gender, serta menerapkan kebijakan sekolah yang prokesetaraan. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam mendukung proses ini juga sangat penting sebagai upaya nyata mewujudkan lingkungan pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh peserta didik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *KESETARAAN GENDER: SEBUAH TIJAUAN TEORI FEMINISME*. 9(2), 167–186.
- Fadilatun Nisa As Sayuti, & Syahrul Sitorus. (2025). Pengembangan Kurikulum PAI yang Responsif Gender Sebagai Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan dalam Dunia Pendidikan. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 423–432.
<https://doi.org/10.61253/tz9wm710>
- Febri, H., & Ponorogo, I. (2022). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga di Krandegan Kebonsari Madiun. *JouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(2), 11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>.
- Fibrianto, A. S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1).
- Harefa, N., Pasaribu, V. A. R., & Rajagukguk, J. (. (2024). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 11(September), 262–269.
- Isworo, E., & Ahmad, N. (2025). Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Kampung Baru Pasarkliwon Kota Surakarta dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Gender. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 3(03), 137–145.<https://doi.org/10.58812/ejim.cs.v3i03.368>
- Judiasih, S. D. (2022). IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun biasa disebut jenis kelamin . Padahal , gender dan jenis kelamin adalah hal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 5, 284–302.
[file:///C:/Users/USER/Download/s/904-Article_Text-3928-2-10-20220814 \(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Download/s/904-Article_Text-3928-2-10-20220814 (3).pdf)
- Kadir, M. (2025). Isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Serta Tantangan Dan Solusi, 7(April), 51–61.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI
- Kusumawardhana, I., & Pertamina, U. (2015). ANALISIS LEGAL SOSIAL TERHADAP KONDISI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM. 751–776.

- Larashati. (2022). Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(2), 55–61.
- Lawado, I. S., & Na'imah, N. (2019). Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia. *Egalita*, 13(1), 51–63.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8078>
- Manalu, Y., Simatupang, R. H., & Silaen, C. F. B. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 27–40.
<https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.81>
- Mantu, R., Utara, S., Kawasan, S., Road, R., & Manado, I. K. (2022). *Multikultural dan Kesetaraan Gender Equality in Multicultural Society*. 2(2), 105–113.
- Nani Sumarni, & Soleha, L. K. (2024). Strategi Pemberdayaan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMA Muslimin Sindangkerta. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2208–2212.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2548>
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, Dan Solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 53.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekian Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 52–58.
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>
- Suharjuddin, D. (2020). Kesetaraan Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya. In Novrian (Ed.), *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* (Vol. 1, Issue 1). CV. Pena Persada.
- Sulistiyowati Yuni. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol.1(No.2), 1–14.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2317>
- Theresia Panggabean, D. (2024). Membangun Kesadaran Gender Melalui Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. *Cendikia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(3), 454–474.
- Yanti, F., Ramadhani, M., Haq, F. N., & Pratiwi, D. T. (2025). *KESETARAAN GENDER SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN GENDER EQUALITY AS A FOUNDATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT: CHALLENGES, STRATEGIES, AND POLICY*. 19, 119–133.
- Yuniar, A., & Yuniasih, A. F. (2022). Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Capaian Pendidikan di Indonesia Tahun 2015–2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 116–130.
<https://doi.org/10.21002/jepi.2022.07>